



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.608, 2020

LPSK. Arsip Dinamis. Sistem Klasifikasi
Keamanan.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukan sistem yang memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang mampu merespon tuntutan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan memudahkan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan hak untuk mengakses arsip dinamis di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
4. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
5. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK adalah acuan bagi pejabat dan pegawai terkait dalam menyediakan layanan informasi Arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara

internal maupun eksternal dengan prinsip cepat, tepat, terotorisasi dan aman.

6. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga pemerintahan.
8. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Unit keArsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
13. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan LPSK.
14. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar LPSK.
15. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
16. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
18. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

- (1) Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis dibedakan berdasarkan tingkat klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan
 - b. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (3) Klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LPSK.
- (4) Klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan LPSK.
- (5) Klasifikasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga dapat mengganggu kinerja LPSK seperti Arsip yang tercipta dari proses pemberian layanan perlindungan saksi dan

korban.

Pasal 3

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Sarana perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional, berupa rak Arsip, brankas, atau lemari besi;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi keArsipan serta memiliki dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di *Central File*, Pusat Arsip dan Unit Kerja LPSK.

- (2) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam pengamanan Arsip di Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses Arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *central file* dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB III

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP

Pasal 6

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan dapat berupa:
 - a. pemasangan kamera pengawas, jika diperlukan;
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan Arsip.
- (2) Media simpan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rak besi untuk Arsip Biasa/Terbuka;
 - b. rak Arsip untuk Arsip Terbatas; dan
 - c. lemari besi atau brankas untuk Arsip Rahasia.

Pasal 7

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan LPSK meliputi:

- a. penciptaan daftar Arsip Terbatas; dan
- b. daftar Arsip Rahasia.

Pasal 8

Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat Arsip dan di *central file*.

BAB IV
PENYERAHAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga keamanan informasi Arsip Dinamis, penyerahan Arsip dapat dilakukan dengan cara:
 - a. konvensional; atau
 - b. elektronik.
- (2) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan cetak.
- (3) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan digital.

Pasal 10

Penyerahan Arsip Dinamis secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
- b. dengan cara dimasukkan dalam amplop bersegel, untuk Arsip Terbatas; dan
- c. dengan cara:
 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 2. diberi kode rahasia;
 3. menggunakan amplop ganda;
 4. amplop bersegel dan dibubuhi stempel "RAHASIA";
 5. Konfirmasi tanda terima; dan
 6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia, untuk Arsip Rahasia.

Pasal 11

Penyerahan Arsip Dinamis secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
- b. dengan cara:
 1. penggunaan enkripsi;
 2. penggunaan alamat khusus; atau
 3. penggunaan sandi,untuk Arsip Terbatas yang berisi data tentang informasi personal;
- c. dengan cara:
 1. pengkonfirmasi dari penerima surat elektronik;
 2. penggunaan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia;
 3. penggunaan persandian atau kriptografi; dan
 4. pelacakan akses informasi untuk suatu surat elektronik,untuk Arsip Rahasia.

BAB V

HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.
- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.

Pasal 13

Pengguna Internal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Pimpinan LPSK mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.

- b. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal) dan Jabatan Tinggi Pratama (Kepala Biro) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- c. Pimpinan Tingkat Menengah, yaitu jabatan Administrator (Kepala Bagian) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- d. Pelaksana kebijakan yaitu Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian) dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- e. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengguna Eksternal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 15

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
PK	PERUMUSAN KEBIJAKAN				
00	Kajian pengusulan perlindungan saksi dan korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
01	Penyiapan kebijakan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat	Biro Penelaahan Permohonan

02			Perumusan dan penyusunan bahan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
						Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	

03		Pemberian masukan (<i>hearing</i>) dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pencelaahan Permohonan
04		Penetapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Pencelaahan Permohonan

						terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	
PP		PENELAAHAN PERMOHONAN					
00		Sumber Informasi Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan	

00.00	Penerimaan dan penelaahan permohonan datang langsung	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
00.01	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui surat elektronik	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Penelaahan Permohonan

	00.02	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui aplikasi daring	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
	00.03	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui <i>call center</i> 148	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan

00.04	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui layanan pro aktif	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
00.05	Penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan darurat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan

01		Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pencelaahan Permohonan
02		Investigasi dan Penilaian	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pencelaahan Permohonan

PA		PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PUTUSAN					
00		Penyiapan persidangan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pencelaahan Permohonan	
01		Administrasi Putusan Rapat Paripurna	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak	Biro Pencelaahan Permohonan	

	01.00	Putusan diterima	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Penelaahan Permohonan		

01.01	Putusan ditolak	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pencelaahan Permohonan
01.02	Putusan ditolak dan diberikan rekomendasi	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pencelaahan Permohonan

01.03	Putusan dihentikan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pencelaahan Permohonan
01.04	Putusan diperpanjang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pencelaahan Permohonan

01.05	Putusan penambahan layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pencelaahan Permohonan
HS	PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN				

00		Penyiapan Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	00.00	Pencelaahan Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

	00.01	Laporan Hasil Penelaahan Layanan dan Risalah	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
01		Pelaksanaan Pemberian Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

01.00	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
01.01	Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

	01.02	Tindak Pidana Terorisme	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	01.03	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

	01.04	Narkotika dan Psikotropika	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	01.05	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

01.06	Tindak Pidana Penyiksaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
01.07	Tindak Pidana Penganiayaan Berat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

01.08	Tindak Pidana Lainnya	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
02	Laporan Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

03		Paska Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	03.00	Paska Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

	03.01	Laporan Pemantauan Paska Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
--	-------	----------------------------------	---------	---	--	-------------------------------------

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
PR	PERENCANAAN				
00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Master Plan (RPJP)				
00.00					

00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
00.02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan				
00.03	Rencana Strategis (Renstra)				
01	Rencana dan Program Kerja Tahunan (PKT)				

01.00	Rencana Kerja LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
01.01	Usulan unit kerja beserta data pendukung	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
01.02	Usulan LPSK ke Instansi terkait	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
01.03	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
01.04	Program Kerja Tahunan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

	01.05	Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.06	Rapat Pimpinan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.07	Rakor Internal LPSK	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.08	Usulan Khusus	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
02		Penetapan Kontrak Kinerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	02.00	Penetapan Kinerja Eselon I				

		dengan Ketua LPSK					
	02.01	Penetapan Kinerja Unit Kerja (Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama, III, dan IV)					
	02.02	Indikator Kinerja					
03		Penyusunan Laporan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK		Bagian Perencanaan dan Keuangan
	03.00	Laporan Berkala a. Laporan					

			g. Laporan Tahunan LPSK (Laprah, Laptri, Lap Monev, dll)			
03.01			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAKIN)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK
						Bagian Perencanaan dan Keuangan
03.02			Laporan Insidental / Khusus a. Laporan Pemantauan			

04	Evaluasi Program	Prioritas b. Laporan Pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal c. Laporan Pelaksanaan kegiatan/program tertentu d. Laporan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
----	------------------	---	--------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

04.00	Evaluasi Program Unit Kerja	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
04.01	Evaluasi Program LPSK				
04.02	Rekomendasi Kinerja				
05	Penyusunan Anggaran				
05.00	Kebijakan / Peraturan Penganggaran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.01	Ketetapan Pagu Indikatif / sementara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

05.02	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan lainnya) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan RUU APBN b. Risalah rapat pembahasan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
-------	---	-------------------	--	--	---------------------------------

					Persetujuan RUU APBN				
05.03		Ketetapan Pagu Definitif	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
05.04		Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

05.05	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.06	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

	05.07	Pemerintah (RASKIP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
	05.08	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
	05.09	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		Standar Biaya Keluaran (SBK)	Biasa/ Terbuka					

KU	KEUANGAN						
00	Pelaksanaan Anggaran						
	00.00 Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
01	Dokumen Realisasi Pendapatan						
	01.00 Surat Setoran Pajak (SSP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		

01.01	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)								
01.02	Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Penggembalian Belanja								
01.03	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank								

01.04	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja						
01.05	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara						
02	Belanja						
02.00	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		

02.01	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
02.03	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

02.04	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Catatan yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: a. Pengumuman lelang b. Dokumen prakuwalifikasi c. Dokumen				

	02.05									
j. Serah terima barang dan jasa		Dokumen Pembayaran Keuangan a. Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas b. Bukti-Bukti	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan				

03	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Tagihan dari Pihak Ketiga c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) d. Surat Perintah Membayar (SPM) e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan (SP3)				

03.00	Buku Kas Umum (BKU)	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	mengganggu fungsi dan tugas L.PSK	dan Keuangan
03.01	Buku Kas Pembantu (BKP)			
03.02	Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran			
03.03	Rekening Koran Bank			
03.04	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara			
03.05	Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)			

	03.06	Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga				
	03.07	Daftar Rekapitulasi PNEP				
	03.08	Izin Penggunaan Kas Besi				
04	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur / Honorarium/Uang Makan		Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungannya kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan

05	Kartu Gaji	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
06	Dokumen Akuntansi Keuangan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	06.00					Berita Acara Pemeriksaan Kas
	06.01					Kas/ Register Penutupan Kas
	06.02					Arsip Data Komputer (ADK)
	06.03	Laporan Pendapatan				

		Negara					
	06.04	Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulanan/ semesteran					
	06.05	Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN					
07		Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK		Bagian Perencanaan dan Keuangan

08	Laporan Keuangan Tahunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	08.00					Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	08.01					Neraca
	08.02					Laporan Arus Kas
	08.03					Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
08.04	Laporan TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)					

08.05	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
08.06	Monev Pelaksanaan Anggaran				
09	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
09.00	Manual Implementasi dan Kebijaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

09.01	Kebijakan Akuntansi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
09.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
09.03	Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
10	Pertanggungjawaban Keuangan Negara				

10.00	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
10.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

	10.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	10.03	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri					

11.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green book</i>)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.03		Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Opini Hukum, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.04		Alokasi dan Relokasi Penggunaan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

	11.05	Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) a. <i>Reimbursement</i> b. <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i>					

11.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung Lainnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
-------	---	----------	---	--	------------------------------------

11.08	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor meliputi antara lain : No <i>Objection Letter</i> <i>(NOL), Project</i> <i>Implementation,</i> <i>Notification of</i> <i>Contract,</i> <i>Withdrawal</i> <i>Authorization</i> <i>(WA), Statement</i> of <i>Expenditure(SE)</i>	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
-------	--	----------	---	--	------------------------------------

)						
11.09		<i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
11.10		Report /Laporan a. <i>Progress Report</i> b. <i>Monthly Report</i> c. <i>Quarterly Report</i> d. <i>Final Report/Completion Report</i>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan		

11.11	Laporan Hutang Negara a. Laporan pembayaran hutang negara b. Laporan posisi hutang negara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				

12.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan a. Kuasa Pengguna Anggaran, b. Kuasa Pengguna Barang / Jasa c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Pejabat Pembuat Daftar	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
-------	--	-------------------	--	--	------------------------------------

13	<p>Gaji</p> <p>e. Pejabat Penandatanganan SPM</p> <p>f. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran</p> <p>g. Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.</p>	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	<p>Verifikasi Anggaran</p> <p>a. Nota Hasil Verifikasi NHV)</p> <p>b. Jawaban Nota Hasil</p>				

	Verifikasi (JNHV)						
RT							
00	KERUMAHTANGGAAN Pengadaan						
	00.00 Analisa Kebutuhan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
	00.01 Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemilihan)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		

		Langsung/Lelan g)						
	00.02	Daftar Rekanan Mampu	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
	00.03	Scrah Terima Barang	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
01		Pendistribusian	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
02		Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		

03	Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04	Pengurusan Kendaraan Dinas 1. Pengurusan surat - surat kendaraan dinas 2. Pemeliharaan dan perbaikan 3. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
05	Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

06	Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
07	Penghematan Energi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08	Ketertiban dan Keamanan				
	08.00 Pengamanan, dan penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.01 Laporan Ketertiban dan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

		Keamanan yang terdiri atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.		Pengawas		
09	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
10	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
11	Pengadaan Outsourcing	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	

12	Ijin Peminjaman Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
13	Sumbangan dan Bantuan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
BM	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)				
00	Simak BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01	Pembukuan BMN 1. Daftar barang kuasa/ pengguna 2. Kartu Identitas Barang	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	(KIB)				
03	Inventarisasi BMN 1. Keputusan Pembentukan Tim 2. Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi 3. Kertas kerja Inventarisasi 4. Berita acara inventarisasi 5. Daftar inventaris/buku barang/daftar barang 6. Laporan hasil	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

04	inventarisasi	Laporan BMN 1. Laporan kondisi barang 2. Laporan barang kuasa pengguna 3. Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal 4. Laporan persediaan habis pakai 5. Laporan persediaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
----	---------------	---	-------------------	---	--	-------------

	tidak habis pakai					
	6. Laporan pengelolaan Barang Milik Negara					
05	Rumah Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
06	Tanah	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
07	Penggunaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
08	Pemanfaatan BMN					

08.00	Sewa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.01	Pinjam Pakai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.02	Kerjasama pemanfaatan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.03	Bangun guna serah / Bangun serah guna	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.04	Kerjasama penyediaan infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
09	Pemindahtanganan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum

			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	mengganggu kinerja LPSK	
10	Pengamanan dan Pemeliharaan BMN					
	10.00 Pemeliharaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
	10.01 Laporan Pengamanan dan/atau pemeliharaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
11	Pengawasan dan pengendalian BMN					
	11.00 Pemantauan dan pencertiban BMN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	

	11.01	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN	Terbatas	Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
12		Penghapusan dan Pemusnahan EMN 1. Keputusan pembentukan tim 2. Berita acara penghapusan BMN 3. Daftar barang yang dihapus 4. Laporan hasil pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	

TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI								Bagian Umum
00	Rencana Strategis /Master Plan Pembangunan Sistem Infomasi Manajemen (SIM)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK					Bagian Umum
01	Dokumen Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK					Bagian Umum

02	Dokumentasi Implementasi	Biasa/ Terbuka	Pengawas Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
03	Perekaman dan Pemutakhiran Data 1. Formulir isian 2. Daftar Petugas Perekaman 3. Jadwal Pelaksanaan 4. Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	

04	<p>Migrasi Sistem Aplikasi dan Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan migrasi 2. Pelaksanaan migrasi 3. Berita acara kegiatan migrasi 4. Daftar sistem aplikasi dan data yang di migrasi 5. Laporan hasil migrasi 	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
05	<p>Dokumen hosting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan barang 2. Laporan hasil uji kelayakan 3. Laporan pelaksanaan hosting 	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

06	Pengamanan Jaringan dan Layanan back up data digital	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
07	Lisensi Perangkat TIK dan Sistem Informasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
	08.00 Administrasi LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.01 Aplikasi LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.02 Verifikasi Penyedia	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	08.03	Akun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
	08.04	Pelatihan SPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
	08.05	Standar LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
	08.06	Laporan LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
BJ	PENGADAAN BARANG								

00	DAN JASA						
	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	00.00 Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
	00.01 Rencana dan Analisis Kebutuhan Barang	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	01.00 Lelang umum / Lelang terbatas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		

01.01	Swakelola / Pengadaan Langsung/ e - Purchasing/ e - catalogue	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01.02	Penunjukan Langsung	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01.03	Telaah pelaksanaan lelang/pemilikan /penunjukan langsung	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	01.04	<p>Dokumen lelang</p> <p>1. Barang inventaris kantor/barang bergerak (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)</p> <p>2. Barang invetasi (penawaran</p>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
--	-------	--	-------------------	---	--	-------------

		pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)					
02	Monev Pengadaan Barang dan Jasa	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
PW	PENGAWASAN						
00	Rencana Pengawasan						
	00.00 Rencana Strategi Pengawasan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan		

00.01	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
00.02	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
00.03	Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
00.04	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01	Pelaksanaan Pengawasan				
01.00	Laporan yang memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan

01.01	Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.02	Laporan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.03	Laporan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.04	Laporan Pemutakhiran Data Tindak	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan

	01.05	Laporan LHKPN dan LHKASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan			
	01.06	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan			
	01.07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan			

		LPSK						
	01.08	Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan		
	01.09	Laporan Hasil Evaluasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan		
	01.10	Pemantauan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan		
	01.11	Pembangunan Pakta Integritas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan		

01.12	Manajemen Risiko	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.13	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan
01.14	Pengawasan bidang keArsipan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan
HK	HUKUM				
00	Program Legislasi				
00.00	Bahan/materi program legislasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

		nasional dari LPSK		Pengawas		
	00.01	Program legislasi LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01		Rancangan Peraturan Perundang-undangan				
	01.00	Berkas rancangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

		Perlindungan Saksi dan Korban	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01.01		Berkas rancangan proses penyusunan produk hukum LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01.02		Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang bersifat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

		nasional/ regional /instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir					
	01.03	Surat Perintah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum	
02		Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum	

03	<p>Dokumentasi Hukum</p> <p>a. Eksternal Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan - peraturan yang dijadikan referensi</p> <p>b. Internal Produk peraturan perundangan LPSK yang dijadikan referensi</p>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
04	Soisiasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum (Pidana, Perdata, Tata				

	Usaha Negara dan Agama)					
	04.00	Bahan Materi kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/pembinaan hukum	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	04.01	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi / Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
05		Bantuan/ konsultasi hukum/advokasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

06	Kasus / Sengketa Hukum						
	06.00	Pidana	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas L.PSK	Biro Administrasi	
	06.01	Perdata	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas L.PSK	Biro Administrasi	
	06.02	Tata Usaha Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas L.PSK	Biro Administrasi	

06.03	Arbitrase	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Biro Administrasi
07	Telaah Hukum				
07.00	Telaah Hukum Regulasi Internal LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
07.01	Telaah Hukum Eksternal yang berkaitan dengan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08	Perizinan				
08.00	Pemberian/ Persetujuan/ Kewenangan/ Rekomendasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

08.01	Penolakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08.02	Peringatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08.03	Pencabutan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08.04	Perpanjangan Izin	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08.05	Dispensasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
09	Hak Atas Kekayaan				

Intelektual (HAKI)						
	09.00	Hak Cipta	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi
	09.01	Hak Paten Biasa dan Sederhana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi
	09.02	Hak Merek	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi

10	Surat Kuasa							
	10.00	Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum		
	10.01	Surat Kuasa dengan Hak Substitusi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum		
	10.02	Surat Kuasa Lainnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum		
OT		ORGANISASI DAN TATA						

	LAKSANA						
00	Struktur Organisasi LPSK						
	00.00 Pembentukan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		
	00.01 Perubahan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		
	00.02 Pembubaran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		
01	Organisasi						
	01.00 Standar Kompetensi Jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum		

	01.01	Evaluasi Kelembagaan/Or ganisasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
02	Tata Laksana		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03	Reformasi Birokrasi					
	03.00	Implementasi Reformasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

		Birokrasi		Pengawas		
	03.01	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
KS		KERJASAMA				
00		Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01		Nota Kesepahaman / Memorandum of				

	Understanding (MoU)					
	01.00	Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
02		Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama / Pedoman Kerja				
	01.00	Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum

				Pengawas	LPSK	
03	Penguatan dan Evaluasi Jaringan Kerjasama	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum	
HM	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
00	Keprotokolan					
	00.00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum	

00.01	Buku Tamu	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
00.02	Agenda Kegiatan Pimpinan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
00.03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
00.04	Kunjungan Dinas Eksternal	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
00.05	Daftar nama / alamat kantor / Pejabat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum

01	Dokumentasi / Peliputan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
02	Pengumpulan, pengelolaan, dan Penyajian Informasi				
	02.01 Kliping Koran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	02.02 Brosur/leaflet/p oster/plakat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	02.03 Pengumuman/p emberitaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

03	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi								
03.00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum				
03.01	Hubungan dengan Organisasi Sosial (LSM)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum				
03.02	Hubungan dengan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum				

		perusahaan atau pihak swasta		Pengawas		
	03.03	Hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	03.04	Forum Kehumasan / (Bakohumas / Perhumas)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	03.05	Hubungan dengan media massa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
04	Bahan Materi Sidang atau Musyawarah Nasional		Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum

05	Penerbitan Cetak (majalah, buletin, koran dan jurnal)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
06	Publikasi melalui media cetak, elektronik dan online	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
07	Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08	Pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
10	Pemberian Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa,	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

11	dan permohonan maaf						
	Pidato atau Sambutan Pimpinan						
	11.00 Sambutan Pimpinan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		
	11.01 Sambutan Eselon I dan II	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		
12	Pelayanan PPID						
	12.00 Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum		

12.01	Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
12.02	Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi masih dalam proses	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
12.03	Tanda Bukti Penyerahan Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
12.04	Pernyataan Keberatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

AR	KEARSIPAN							
00	Administrasi Persuratan							
	00.00 Kartu Kendali	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
	00.01 Buku Agenda	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
	00.02 Lembar Pangantar / buku Ekspedisi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
	00.03 Formulir / catatan permintaan dan layanan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			

01	penggandaan dokumen / Arsip								
	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip								
	01.00 Daftar Arsip diantaranya Arsip Dinamis, Arsip informasi publik dan Arsip vital	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan				
	01.01 Daftar Pencarian Arsip	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan				
	01.02 Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan				

02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
03	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
04	Penyusutan Arsip				
	04.00 Pemindahan Arsip Inaktif a. Berita acara pemindahan b. Daftar Arsip yang dipindahkan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan

04.01	<p>Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara pemusnahan b. Daftar Arsip yang dimusnahkan c. Rekomendasi/pe rtimbangan/pers etujuan pemusnahan Arsip dari Unit Kerja Terkait dan ANRI 	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
-------	--	----------	---	---	--------------------------

								Bagian TU dan Persuratan
							Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	
							Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	
							Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	
							Terbatas	
							Biasa/ Terbuka	
05	04.02	d. Surat keputusan pemusnahan	Penyerahan Arsip Statis a. Berita acara serah terima Arsip b. Daftar Arsip yang diserahkan	Berkas Proses Alih Media Arsip				
06								

06.00	Apresiasi, Sosialisasi dan Penyuluhan KeArsipan/Loka karya/Workshop	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
06.01	Bimbingan teknis keArsipan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
06.02	Supervisi, evaluasi dan monitoring	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
07	Akreditasi KeArsipan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
08	Audit KeArsipan (internal dan eksternal)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian TU dan Persuratan

				Administrator	LPSK	
PT	KEPUSTAKAAN					
00	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka					
	00.00 Bukti Penerimaan koleksi deposit bahan pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan	
	00.01 Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan	

01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka								
01.00	Buku Induk Koleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan				
01.01	Daftar Buku Terseleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan				
01.02	Daftar Buku dalam pemesanan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan				

01.03	Daftar Buku dalam Permintaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.04	Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.05	Daftar Penerimaan bahan pustaka surplus	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.06	Lembar kerja pengolahan BP (buram)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan

	01.07	Shef List dan Master List	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
	01.08	Daftar tambahan koleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
	01.09	Daftar jajaran kendali	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			
02		Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi							
	02.00	Data dan statistik anggota,	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan			

		pengunjung dan peminjaman bahan pustaka		Pengawas		
	02.01	Pertanyaan, rujukan, dan jawaban	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
03	Preservasi Bahan Pustaka					
	03.00	Survei Kondisi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	03.01	Repografi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	03.02	Fumigasi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan

KP									
00	KEPEGAWAIAN								
	Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian								
	00.00	Pengkajian, Pengusunan Kebijakan, dan Naskah Akademik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
	00.01	Penyusunan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			
	00.02	Perumusan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum			

					Pengawas				
	00.03	Pemberian masukan dan dukungan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
	00.04	Penetapan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
	00.05	<i>Memorandum of Understanding</i> bidang kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum		
01		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					Bagian Umum		

01.00	Perencanaan Kebutuhan ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01.01	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01.02	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
01.03	Standarisasi Jabatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
02	Formasi dan Pengadaan Pegawai				

03.00	Formasi ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
03.01	Pengadaan ASN 1. Proses penerimaan pegawai 2. Penetapan pengumuman kelulusan 3. Berkas lamaran yang tidak diterima 4. Nota usul dan kelengkapan NIP c. Nota usul	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

		pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun f. Surat keputusan CPNS / PNS Kolektif				
03	03.02	Sistem Rekrutmen ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
		Mutasi Pegawai				
	03.00	Usulan Mutasi Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.01	Persetujuan/Pertimbangan Kepala	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	BKN	Terbatas	Pengawas		
03.02	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
03.03	Mutasi Keluarga 1. Surat izin pernikahan/perceraian 2. Surat penolakan izin 3. Akta nikah/cerai 4. Akta kelahiran anak	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum

	5. Surat keterangan meninggal dunia	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
03.04	Usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
03.05	Usul pengangkatan, pemecatan, sementara dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum

03.06	Usul penetapan perubahan data dasar/status/keudukan hukum pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
03.07	Usulan Peninjauan Masa Kerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
03.08	Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04	Pengembangan Karir				
04.00	Usulan Pengembangan Karir	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

04.01	Surat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPL) / Sertifikat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04.02	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
04.03	Pakta Integritas Pegawai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04.04	Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum

04.05	Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
04.06	Disiplin pegawai 1. Daftar hadir 2. Rekapitulasi daftar hadir	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
04.07	Berkas Hukum dan Disiplin	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
04.08	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
05	Kinerja				
05.00	Hasil Penilaian kinerja dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Umum

		standar kerja		Administrator	LPSK	
05.01	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
05.02	Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	

06	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN							
06.00	Kode etik pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum			
06.01	Disiplin Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum			
06.02	Pemberhentian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum			
06.03	Pensiun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum			

					Administrator	LPSK	
07	Bantuan Hukum						
	07.00 Pemberian Bantuan Hukum	Terbatas		Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
	07.01 Bantuan Hukum Pegawai	Terbatas		Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
08	Status dan Kedudukan Pegawai						
	08.00 Pertimbangan Status Kepegawaian	Terbatas		Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
	08.01 Pertimbangan Kedudukan	Terbatas		Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Umum	

		Kepegawaian		Administrator	LPSK	
	08.02	Penyelesaian pengelolaan keberatan kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	08.03	Perselisihan / sengketa kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
09		Sistem Informasi Kepegawaian				
	09.00	Pengolahan data dan informasi kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	09.01	Pengembangan sistem informasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	kepegawaian			Pengawas		
10	Pengawasan dan Pengendalian					
	10.00 Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
	10.01 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
	10.02 Gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	

10.03	Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
10.04	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
10.05	Berkas sanggahan terhadap Permasalahan tenaga Honororer	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
11	Administrasi Pegawai				
11.00	Surat Perintah Dinas / Surat Tugas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

11.01	Cuti Sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
11.02	Cuti Alasan Penting	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
11.03	Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
11.04	Dokumentasi identitas pegawai 1. Usul penetapan kartu 2. Keanggotaan organisasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum

11.06	Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
11.07	Berkas Kehadiran Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
11.08	Berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
11.09	Penghargaan pegawai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12	Kesejahteraan Pegawai				

12.00	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12.01	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ BPJS	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12.02	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12.03	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

12.04	Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12.05	Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal Karena Dinas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
12.06	Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12.07	Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

	12.08	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.09	Berkas tentang Medical Record	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
13	Administrasi Perseorangan					
	13.00	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan

13.01	Berkas Perscorangan PPPK	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
13.02	Berkas Perscorangan Anggota LPSK	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan

14	13.03 Berkas Perscorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
14	Penilaian Kompetensi				
14.00	Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
14.01	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
15	Pendelegasian wewenang				

	15.00	Pelaksana Tugas (Plt.)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	15.01	Pelaksana Harian (Plh.)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
16		Perkumpulan Pegawai dan Non Pegawai				
	16.00	KORPRI	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	16.01	Dharma Wanita	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

16.02	Koperasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		
16.03	Lainnya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum		

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO